

**PERNYATAAN PPID UTAMA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

Terhadap pertanyaan kuesioner Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 mengenai:

Aspek Barang dan Jasa

II dan III Mengumumkan Dokumen Tahap Pemilihan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

(Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk Kemudahan PSN)

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024, terdapat beberapa dokumen yang sama sekali tidak dipersyaratkan pada beberapa pengadaan barang dan jasa yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Keterangan
II. Pengumuman Informasi Tahapan Pemilihan		
8	Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
9	Gambar Rancangan Pekerjaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
13	Sertifikasi atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
III. Pengumuman Tahap Pelaksanaan		
4	Surat Jaminan Pelaksanaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
5	Surat Jaminan Uang Muka	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
6.	Surat Jaminan Pemeliharaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Jakarta, Oktober
PPID Utama,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian

Haryo Limanseto 

**PERNYATAAN PPID UTAMA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

Terhadap pertanyaan kuesioner Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 mengenai:

Aspek Barang dan Jasa

II dan III Mengumumkan Dokumen Tahap Pemilihan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

(Pengadaan Jasa Lainnya - Nonkompetisi Sewa Kantor untuk Keasdepan Ekonomi Digital)

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024, terdapat beberapa dokumen yang sama sekali tidak dipersyaratkan pada beberapa pengadaan barang dan jasa yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Keterangan
II. Pengumuman Informasi Tahapan Pemilihan		
8	Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
9	Gambar Rancangan Pekerjaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
13	Sertifikasi atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
III. Pengumuman Tahap Pelaksanaan		
4	Surat Jaminan Uang Muka	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
5	Surat Jaminan Uang Muka	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
6.	Surat Jaminan Pemeliharaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa

10	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa
----	-------------------------------	---

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Jakarta, Oktober
PPID Utama,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian

Haryo Limanseto 